

**MEDIA SOSIAL
PEMERINTAHAN
DAERAH**

Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

MEDIA SOSIAL PEMERINTAHAN DAERAH

Angga Rosidin

**Editor
Moh. Makbul, S.AP., M.AP**



MEDIA SOSIAL PEMERINTAHAN DAERAH

© Angga Rosidin

Diterbitkan pertama kali oleh Litera Inti Aksara. Tahun 2026

Hak penerbitan pada Litera Inti Aksara.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved* Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Pertama kali diterbitkan, April 2026

xvi +106 hlm, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-634-96757-3-4 (EPUB)

Penulis : Angga Rosidin
Editor : Moh. Makbul, SAP, MAP
Perancang Sampul : Litera Think
Penata Letak : Litera Think

Diterbitkan oleh Penerbit:

Litera Inti Aksara

Anggota IKAPI Daerah Jawa Tengah

No. 312/JTE/2026

Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas

Telp. 0813 2923 156

E-mail : litera.aksara@gmail.com

<https://literaaksara.com/>

PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “*Media Sosial Pemerintah Daerah*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memahami peran media sosial sebagai bagian penting dari transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan bisnis, tetapi juga memengaruhi cara pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik, pengelolaan administrasi, serta komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah di berbagai negara kini dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, transformasi digital menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial di masyarakat. Media sosial telah berkembang menjadi ruang komunikasi publik yang sangat dinamis, di mana

masyarakat dapat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta berinteraksi dengan berbagai institusi publik secara langsung. Kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola komunikasi publik secara lebih terbuka, responsif, dan partisipatif.

Selama ini, media sosial sering kali dipandang hanya sebagai sarana publikasi kegiatan pemerintah. Padahal, jika dikelola secara strategis, media sosial memiliki potensi yang jauh lebih besar sebagai instrumen komunikasi kebijakan, sarana pelayanan publik digital, serta sumber data penting untuk memahami opini dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai bagian dari strategi digitalisasi pemerintahan.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran media sosial dalam mendukung digitalisasi pemerintah daerah. Melalui pendekatan akademik dan analisis kebijakan publik, buku ini membahas berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial dalam pemerintahan, mulai dari konsep dasar digital governance, strategi komunikasi digital pemerintah, pengelolaan data dan analitik media sosial, hingga tantangan etika dan risiko disinformasi dalam komunikasi digital.

Selain membahas konsep dan teori, buku ini juga memberikan perhatian khusus pada konteks implementasi digitalisasi pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya

. Pemilihan konteks daerah ini didasarkan pada dinamika perkembangan wilayah yang cukup pesat, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, maupun perkembangan teknologi informasi. Kondisi tersebut menjadikan sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem pemerintahan digital berbasis media sosial.

Secara umum, buku ini terdiri atas sepuluh bab yang disusun secara sistematis. Bab-bab awal membahas landasan konseptual mengenai digitalisasi pemerintahan dan peran media sosial dalam komunikasi publik. Bab-bab berikutnya membahas strategi implementasi media sosial dalam pemerintahan daerah, pengelolaan data digital, serta pengembangan model komunikasi digital pemerintah yang efektif. Selanjutnya, buku ini juga membahas berbagai risiko dan tantangan dalam komunikasi digital, termasuk fenomena disinformasi dan pentingnya etika komunikasi publik di ruang digital.

Pada bagian akhir, buku ini menyajikan analisis mengenai evaluasi kebijakan digital pemerintah daerah serta berbagai rekomendasi strategis untuk pengembangan pemerintahan digital di masa depan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi digitalisasi pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penulis menyadari bahwa transformasi digital dalam pemerintahan bukanlah proses yang sederhana. Digitalisasi

memerlukan perubahan dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan, kelembagaan, budaya organisasi, serta kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan pemerintahan digital membutuhkan komitmen jangka panjang serta kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, sektor swasta, maupun masyarakat sipil.

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik di bidang kebijakan publik, administrasi pemerintahan, serta digital governance. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi pemerintahan, khususnya aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi publik dan pengembangan sistem pemerintahan digital.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan, praktik pemerintahan, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

Serang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1	
FONDASI TEORETIS MEDIA SOSIAL DAN DIGITALISASI PEMERINTAH DAERAH	1
• Pendahuluan	1
• Evolusi Digitalisasi Pemerintahan dan Media Sosial.....	2
• Media Sosial sebagai Sistem Sosio-Teknis dalam Pemerintahan Daerah.....	4
• Media Sosial dalam Perspektif Kebijakan Publik.....	4
• Relevansi Strategis bagi Pemerintahan Daerah	5
• Media Sosial dan Kepercayaan Publik.....	6
• Tantangan Konseptual dan Praktis	6
• Kerangka Teoretis Integratif.....	7
• Penutup.....	7
• Referensi	8
BAB 2	
STRATEGI DAN MODEL IMPLEMENTASI MEDIA SOSIAL DALAM DIGITALISASI PEMERINTAH DAERAH	11
• Pendahuluan	11
• Kerangka Konseptual Implementasi Kebijakan Digital.....	12

- Strategi Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah 13
- Model Implementasi Media Sosial Berbasis Ekosistem Digital..... 15
- Integrasi Med
- Berbasis Elektronik (SPBE) 16
- Kepemimpinan Digital dan Budaya Organisasi 16
- Manajemen Krisis Digital..... 17
- Indikator Keberhasilan Implementasi 17
- Tantangan dan Mitigasi Risiko 18
- Model Strategis untuk 18
- Penutup..... 18
- Referensi 19

BAB 3

STUDI EMPIRIS: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN

DAERAH 21

- Pendahuluan 21
- Capaian Digitalisasi Pemerintahan 22
- Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Media Sosial 23
- Kolaborasi Strategis dalam Pengelolaan Media Sosial OPD 24
- Literasi Digital Masyarakat Banten.....
- Penggunaan Layanan Digital dan Media Sosial Pemerintah..... 24
- Keamanan, Pengawasan Konten, dan Literasi Media.... 26
- Inisiatif Infrastruktur Digital Pendukung Media Sosial... 27
- Keterbukaan Informasi Publik sebagai Dampak Positif

Digitalisasi.....	28
• Analisis Temuan Empiris	28
• Penutup.....	29
• Referensi	30

BAB 4

DATA, ALGORITMA DAN ANALITIK MEDIA

SOSIAL	33
• Konsep Data dalam Pemerintahan Digital.....	33
• Analitik Media Sosial: Pendekatan dan Dimensi Utama	34
• Sumber Data dan Metodologi Pengambilan	35
• Analisis Sentimen: Studi Kasus.....	36
• Topik Modeling dan Tren Percakapan Publik	37
• Algoritma dan Pembelajaran Mesin untuk Media Sosial Pemerintah.....	38
• Visualisasi Data dan Dasbor Digital	39
• Integrasi Data Media Sosial dengan SPBE	39
• Perspektif Etika Data dan Privasi	40
• Tantangan Operasional	41
• Rekomendasi Strategis untuk	41
• Penutup.....	41
• Referensi	42

BAB 5

PARTISIPASI PUBLIK DAN DEMOKRASI DIGITAL: TRANSFORMASI KETERLIBATAN WARGA DALAM DIGITALISASI PEMERINTAH DAERAH.....

• Pendahuluan	43
•	

Landasan Te

Digital.....	44
• Media Sosial sebagai Ruang Deliberasi Publik	45
• Pola Partisipasi Publik Digital.....	46
• Data Empiris Interaksi Publik di Media Sosial Pemerintah Banten.....	47
• Dampak Partisipasi Digital terhadap Tata Kelola Daerah	48
• Tantangan Demokrasi Digital di Banten	48
• Strategi Penguatan Partisipasi Publik Digital	49
• Model Demokrasi Digital Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal.....	49
• Implikasi Kebijakan Jangka Panjang.....	50
• Penutup.....	50
• Referensi	50

BAB 6

MODEL FINAL IMPLEMENTASI MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH: BLUEPRINT DIGITAL GOVERNANCE BERBASIS MEDIA SOSIAL.....	53
• Pendahuluan	53
• Kerangka Konseptual Blueprint Implementasi Media Sosial.....	54
• Tata Kelola Kelembagaan Media Sosial Pemerintah Daerah	55
• Strategi Komunikasi Digital Pemerintah Daerah	57
• Pengelolaan Data dan Analitik Media Sosial.....	58
• Penguatan Partisipasi Publik Digital	59
• Integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	60

- Model Implementasi Media Sosial Berbasis Kearifan Lokal 60
- Indikator Keberhasilan Implementasi Blueprint 61
- Penutup..... 62
- Referensi 62

BAB 7

RISIKO, DISINFORMASI, DAN ETIKA KOMUNIKASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH 65

- Pendahuluan 65
- Risiko Komunikasi Digital dalam Pemerintahan Daerah 67
- Dinamika Disinformasi di Media Sosial 69
- Strategi Pemerintah Daerah Menghadapi Disinformasi 70
- Etika Komunikasi Digital Pemerintah Daerah 72
- Penutup..... 73
- Referensi 74

BAB 8

ROADMAP STRATEGI DIGITALISASI BERBASIS MEDIA SOSIAL: ARAH TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH MENUJU SMART

GOVERNANCE 77

- Penduluan 77
- Konsep Roadmap Transformasi Digital Pemerintahan.... 79
- Tahapan Roadmap Digitalisasi Pemerintah Daerah ... 80
- Roadmap Digitalisasi Media Sosial Pemerintah 84
- Indikator Keberhasilan Roadmap Digitalisasi 85
- Penutup..... 85

- Referensi 86

BAB 9

EVALUASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DIGITAL

ANALISIS EFEKTIVITAS DIGITALISASI

PEMERINTAH DAERAH BERBASIS MEDIA

SOSIAL 87

- Pendahuluan 87
- Konsep Evaluasi Kebijakan Digital 89
- Kerangka Evaluasi Digitalisasi Pemerintahan Daerah 90
- Dampak Digitalisasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan 92
- Tantangan Implementasi Kebijakan Digital 93
- Evaluasi Digitalisasi Pemerintah 94
- Penutup 95
- Referensi 95

BAB 10

REKOMENDASI STRATEGIS DAN MASA DEPAN

PEMERINTAHAN DIGITAL 97

- Penduluan 97
- Penguatan Kebijakan Digital Pemerintah Daerah 99
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Digital 100
- Pengembangan Ekosistem Komunikasi Digital Pemerintahan 101
- Pemanfaatan Data Digital dalam Kebijakan Publik 101
- Masa Depan Pemerintahan Digital di Era Society 5.0
102
- Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah 103

- Penutup..... 104
- Referensi 104

- Tentang Penulis..... 107**

BAB I

Fondasi Teoretis Media Sosial dan Digitalisasi Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan fenomena global yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur organisasi, mekanisme pelayanan publik, serta pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Digitalisasi tidak lagi dipahami sebatas penggunaan perangkat teknologi dalam administrasi, melainkan sebagai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis data (Dunn, 2018; OECD, 2019).

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, digitalisasi memperoleh momentum melalui kebijakan reformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Pemerintah daerah dituntut untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam perencanaan, pelayanan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Salah satu instrumen yang mengalami perkembangan signifikan dalam mendukung proses tersebut adalah media social.

Media sosial telah berevolusi dari sekadar platform